

KEBIJAKAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025

Kamaruddin, Ak., M.Sc.

Plt. Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan

ZI merupakan bagian dari Strategi Percepatan **Reformasi Birokrasi**

1

GRAND DESIGN
REFORMASI
BIROKRASI NASIONAL
2025-2045

2

DRAFT ROAD MAP
REFORMASI
BIROKRASI 2025-2029

3

STRATEGI NASIONAL
PENCEGAHAN KORUPSI
PERPRES NO. 54 TAHUN 2018

4

RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA MENEGAH
NASIONAL 2025-2029



ZONA INTEGRITAS



KAWASAN WBK/WBBM

- TIDAK ADA INDIKASI PRAKTIK KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME
- PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS
- BERKINERJA TINGGI

SYARAT PENGUSULAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS

Syarat	Menuju WBK	Menuju WBBM
Tingkat Instansi Pemerintah	Opini BPK minimal "WTP"	
	Predikat SAKIP minimal "B"	Predikat SAKIP minimal "BB"
	- Indeks RB Minimal "CC" untuk Pemerintah Daerah - Indeks RB Minimal "B" untuk kementerian/lembaga	- Indeks RB Minimal "B" untuk Pemerintah Daerah - Indeks RB Minimal "BB" untuk kementerian/lembaga
	Level Maturitas SPIP Minimal Level 3	
Tingkat unit kerja/satuan kerja	Unit kerja/satuan kerja yang diajukan merupakan <i>core</i> layanan dari instansinya	
	Memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi	
	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan dari APIP/BPK 100%	
	Kepatuhan Penyampaian LHKAN dan LHKPN 100%	
	Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBK minimal satu tahun	Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBBM minimal satu tahun
	Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal "B"	Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal "BB"

Unit/Satuan Kerja Prioritas Stranas PK



01

Rumah Sakit Umum Daerah



02

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



03

Unit/satuan kerja yang menyelenggarakan **sistem administrasi manunggal satu atap**



04

Unit kerja/satuan kerja yang menyelenggarakan **pelayanan terpadu satu pintu**



05

Unit kerja/satuan kerja yang menyelenggarakan **pelayanan pendidikan**



06

Unit kerja/satuan kerja yang menyelenggarakan **pelayanan ketenagakerjaan**

KRITERIA PENETAPAN WBK – WBBM

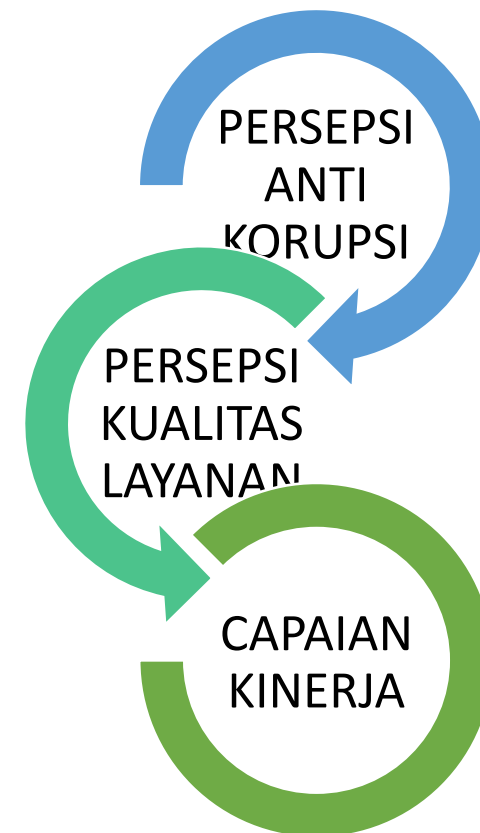
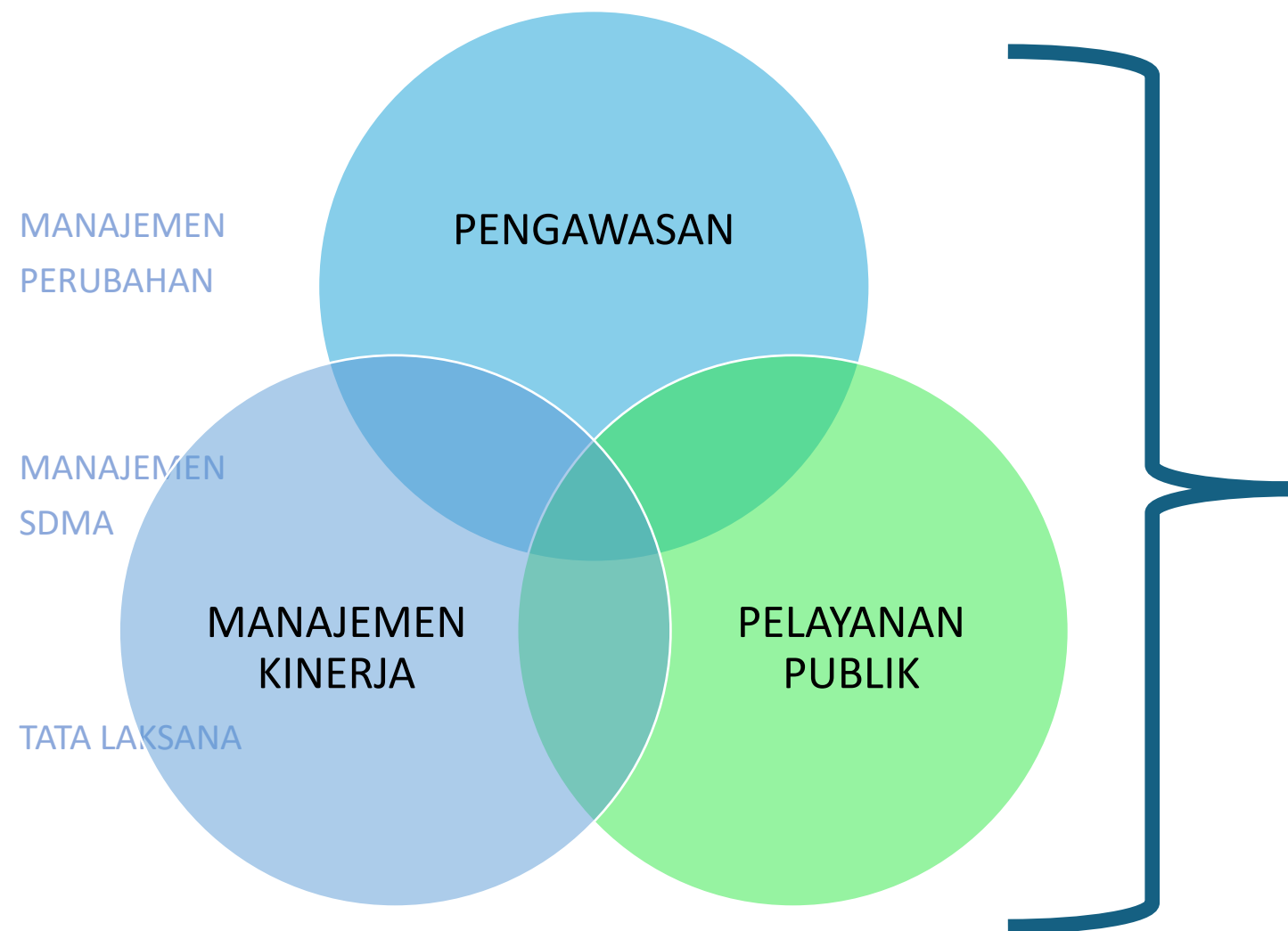
Syarat	WBK	WBBM
Nilai Total	75	85 Telah mendapatkan predikat menuju WBK
Nilai Min. Pengungkit	40	48
Bobot Nilai Min. per area Pengungkit	60%	75%
Nilai Komponen hasil “Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel”	Min. 18,25	Min. 19,50
Nilai sub-Komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi	Min. 15,75 (Indeks 3,60)	Min. 15,75 (Indeks 3,60)
Nilai sub-komponen “Kinerja Lebih Baik”	Min. 2,50	Min. 3,75
Nilai Komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima”	Min. 14,00 (Indeks 3,20)	Min. 15,75 (Indeks 3,60)



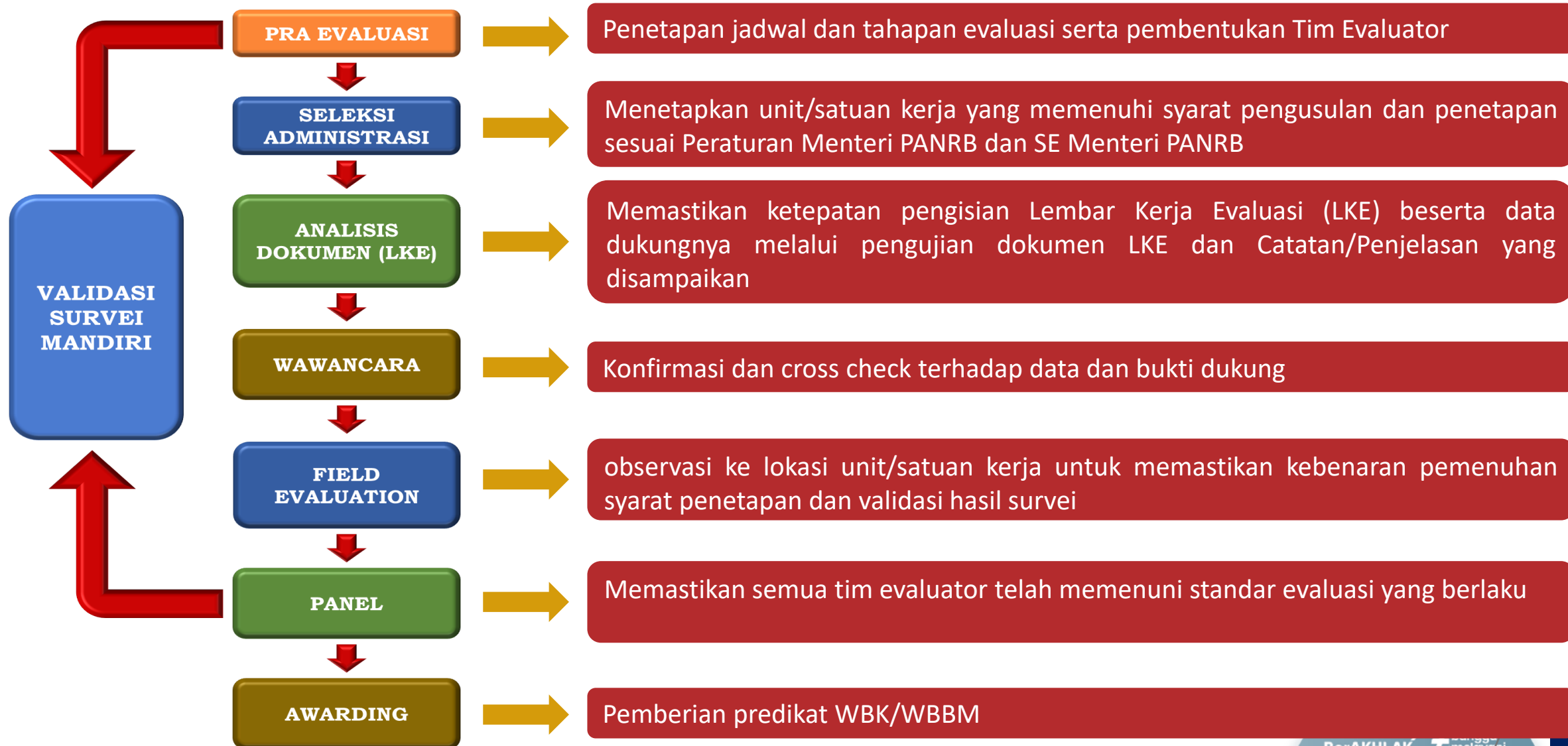
CLEARANCE

- KPK
- ORI
- BIN

Fokus Evaluasi ZI 2025



Tahapan Evaluasi ZI 2025





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

TERIMA KASIH

